

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhamad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Damanik, Pandapotan, et al. *Hukum Administrasi Negara, Teori, Konsep, dan Tata Kelola Pemerintahan*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- Nugraha, Safri. *Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: BPHN, Desember 2007.
- Pratiwi, Ceklia Setya, et al. *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Hukum Administrasi Negara*. Jakarta, Mei 2016.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sulistiyawan, Aditya Yuli. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2022.
- Tedi Sudrajat. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Tjandra, W. Riawan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Tjandra, Riawan. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2018.

Jurnal

- Ahmad Rijali. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2018).
- Artayasa, I Nyoman. "Kedudukan Hukum Administrasi Negara dalam Ilmu Hukum." *Jurnal Cakrawarti* 02, no. 01 (Februari–Juli 2019).

- Djumikasih. "Mode Pencantuman Asas Hukum Dalam Pembentukan Hukum Perikatan Nasional." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 3 (22 September 2022)
- Firmansyah, Vicky Zaynul, dan Firdaus Syam. "Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Penyelenggaraan Birokrasi di Indonesia." *Jurnal Antikorupsi* 7, no. 2.
- Marsudi, Dedi Putra. "Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila." *Likhita Prajna Jurnal Ilmiah* 23, no. 2 (September 2021).
- Muljadi, Stanley Art, et al. "Regulasi Bukti Elektronik Sebagai Instrumen Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Rechtsvinding oleh Hakim." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (Juni 2024).
- Rifai Rusdy, R. M. Iman, dan Suci Flambonita. "Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Pemerintahan Daerah Untuk Mewujudkan Good Governance." *Jurnal Lex Lata* 6, no. 3 (27 November 2023).
- Rokilah, dan Sulasno. "Penerapan Asas Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (Desember 2021).
- Senja Tiarylla, Durriyya, et al. "Pancasila sebagai Dasar Negara di Indonesia." *Jurnal Universitas Sebelas Maret* 2, no. 4 (Desember 2023).
- Solechan. "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik." *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 3 (Agustus 2019).
- Sujadi, Suparjo. "Kajian Tentang Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Keadilan Sosial (Perspektif Hukum Pancasila)." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 4, no. 2 (Februari 2018).
- Wicaksana, Yuristyawan Pambudi. "Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka." *Lex Renaissance* 3, no. 1 (3 Januari 2018).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 482 K/TUN/2021.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.

Surat Kabar/Portal Berita

Amaliyah, Suci. “KH Imam Aziz Jelaskan Kronologi Kebijakan Perangkat Daerah dan Kekerasan Aparat di Desa Wadas.” *NU Online*, 12 Februari 2022.

Diakses dari <https://nu.or.id/nasional/kh-imam-aziz-jelaskan-kronologi-kebijakan-perangkat-daerah-dan-kekerasan-aparat-di-desa-wadas-U1PV4>.

Rahandi, Fernan. “Putusan Hakim Terkait Kasus Wadas Dinilai Tidak Bijak.”

Rejogja.Republika.co.id, 12 Maret 2022.

Munawaroh, Nafiatul. “Fungsi, Ruang Lingkup, dan Asas Hukum Administrasi

Negara.” *Hukum.online*, 29 Oktober 2024.